

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafik 2007.
- Darwan prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafik, Bandung 2002 .
- Dellyana,Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1988.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian hukum*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003.
- Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum Filsafat, Teori, dan Praktik*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Bandung, 2018.
- Soerjono Soekanto, *Sosilogi suatu pengantar*, Penerbit CV Rajawali, Jakarta.
- Alfitra, *Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP*, Penerbit Sinar Grafis, Jakarta, 2014.
- Raharjo Sajipto, *Masalah Penegakan Hukum*. Alumni. Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto. 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafis, 2007.
- Purwanto, H. *Modus Operandi dalam Tindak Pidana Korupsi sebuah pendekatan kriminologi*, Penerbit Raja Grafindo Persada.

Topo Santoso, *hukum pidana suatu pengantar*, Penerbit PT Grafindo Persada, Jakarta, 1998.

Muhammad Mustofa, *Metodologu Penelitian Kriminologi*, Penerbit Predanamedia, Jakarta, 2013.

Nassaruddin, Ende Hasbi. "*Kriminologi.*", PenerbitPustaka Setia, bandung, 2016

B. Data Elektronik

Cahyadi, H. (2020). "Penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam penanggulangan Tindak Pidana Korupsi dana Desa". *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulang*.

Sumber Sarapin, 1977, "Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa", Ghalia Indonesia, Jakarta.

Kurniawan, A, Penegakan hukum tindak pidana korupsi pada penggunaan dana desa. *Jurnal Hukum megister Hukum universitas lampung*, 2019.

Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009.

Nurdjana, *Korupsi dalam praktik bisnis*, Jakarta, PT Gramedia Utama, 2010.

Putri, Dwina. "Korupsi Dan Prilaku Koruptif." *Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains* 5.2 2021.

Hidayah, Astika Nurul. "Analisis Aspek Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pendidikan Anti Korupsi." *Kosmik Hukum* 18.2 2018.

Adam Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2003.

Robert Klitgaard, *Controlling Corruption California*: UC Press, 1991 Hlm 3-6

- Maryanto, "Pemberantasan Korupsi Sebagai Upaya Penegakan Hukum", Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume II, No. 2, 2012.
- Alif Maelani, "*Konsep Pola Asuh Munif Chatib Dalam Buku yang Berjudul Orang Tuanya Manusia*", Skripsi, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2015.
- Jimly Asshiddiqie, 2002, Penegakan Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia, Jurnal Keadilan, Vol 2, No 2, Pusat Kajian Hukum dan Keadilan, Jakarta..
- Harefa, Safaruddin. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam." *University Of Bengkulu Law Journal* 4.1 2019.
- Fattahillah Fahmi, *Penyalahgunaan Fungsi Tanah Kas Desa di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta*, Jurnal No. 2, Vol. 1, 2016.
- Drasil Radja, Thesis: *Aspek Hukum Tanah Kas Desa Dalam Sistem UUPA dan Peranannya Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari Provinsi Jambi*, Medan, 1997.
- Henny Indarriyanti dkk, Fenomenologi Sewa Tanah Bengkok Model Lotre sebagai Strategi Peningkatan Pendapatan Perangkat Desa, *Jurnal prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper Ekonomi dan Bisnis*, Jember, 27-28 Oktober 2017.
- Azyumardi Azra, '*Agama dan Pemberantasan Korupsi*' dalam *Membasmi Kanker Korupsi*, (Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP) Muhammadiyah, 2004).

Bambang Waluyo, "Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia" Jurnal Yuridis, Vol. 1 No.2, Desember 2014, hlm.

Oksep Adhayanto, Pery Rahendra Sucipta, Irman, "Membangun Sistem Politik Yang Tidak Rentan Korupsi (Perspektif Budaya Versus Perubahan Sistem)", Jurnal Selat, Vol 5 No. 1, Oktober 2017.

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana*, di muat dalam Masalah-Masalah Hukum, Semarang, Fakultas Hukum UNDIP, No. 2-4 Tahun XII, 1982.

Revisi Peraturan desa Marwan gembira status pengelolaan tanah bengkok kembali ke desa 2016. diakses pada tanggal 08 september 2024

<https://mediacenter.slemankab.go.id/2023/05/25/mengenai-pemanfaatan-tanah-desa-bupati-sleman-minta-lurah-taati-aturan/> diakses pada tanggal 9/8/2024.

<https://mediacenter.slemankab.go.id/2024/05/31/pemkab-sleman-sosialisasikan-peraturan-gubernur-tentang-tanah-kas-kalurahan/> diakses pada tanggal 15/9/2024

<https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2024/02/07/510/1164120/kronologi-kasus-mafia-tanah-kas-desa-menyeret-lurah-candibinangun-pakem-berawal-rencana-dibangun-waterpark> diakses pada tanggal 15/9/2024

<https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2023/06/11/510/1138262/disidangkan-senin-besok-ini-kronologi-lengkap-kasus-mafia-tanah-kas-desa-menjerat-robinson> diakses pada tanggal 15/9/2024.

<https://www.detik.com/jogja/berita/d-7016543/duduk-perkara-penyalahgunaan-tanah-kas-desa-di-maguwoharjo-sleman> diakses pada tanggal 15/9/2024.

Sarjita, Pengelolaan Tanah Kas Desa, <http://KeuanganDesa.com> diakses pada

08/09/2024

<https://repository.upstegal.ac.id/5137/3/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal

21/9/2024

<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/viewFile/20241/13881>

diakses pada tanggal 25/9/2024

[https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230125-3-modus-utama-korupsi-](https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230125-3-modus-utama-korupsi-politik-yang-perlu-diketahui)

[politik-yang-perlu-diketahui](https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230125-3-modus-utama-korupsi-politik-yang-perlu-diketahui) diakses pada tanggal 25/9/2024

<http://digilib.iblam.ac.id/id/eprint/183/2/2%20BAB%20I.pdf> diakses pada tanggal

1/10/2024

<http://digilib.unila.ac.id/3892/11/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 30/2024

https://www.transparency.org/glossary/term/political_corruption diakses pada 12

september 2024

[https://setkab.go.id/revisi-pp-desa-marwan-gembira-status-pengelolaan-tanah-](https://setkab.go.id/revisi-pp-desa-marwan-gembira-status-pengelolaan-tanah-bengkokkembali-ke-desa-2016)

[bengkokkembali- ke-desa-2016](https://setkab.go.id/revisi-pp-desa-marwan-gembira-status-pengelolaan-tanah-bengkokkembali-ke-desa-2016) diakses pada tanggal 08/09/2024

<https://repository.uin-suska.ac.id/8939/4/BAB%20III.pdf> di akses pada tanggal

17/11/2024

<https://repository.uin-suska.ac.id/8939/4/BAB%20III.pdf> di akses pada tanggal

17/11/2024

[https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20240326-white-collar-crime-dan-](https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20240326-white-collar-crime-dan-pola-pola-yang-menyertainya)

[pola-pola-yang-menyertainya](https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20240326-white-collar-crime-dan-pola-pola-yang-menyertainya) diakses pada tanggal 5 maret 2025

<file:///C:/Users/ACER/Downloads/326-864-1-SM.pdf> di akses pada tanggal 27 febuari

2025

Undang-Undang

Pemendagri No 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa

Pergub DIY 34 Tahun 2014

